

Implementasi Akuntansi Sektor Publik dalam Pencatatan dan Pelaporan Keuangan di Kelurahan Pucangsawit

Vela Agustin^{*1}, Elisabeth Putri Angelita²
^{1,2} Universitas Tunas Pembangunan Surakarta
^{*}e-mail: velaagustin953@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan akuntansi sektor publik di Kelurahan Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Dalam melakukan penelitian ini, peran peneliti sebagai instrumen utama yang terlibat langsung dalam proses penelitian dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara sehingga data yang dikumpulkan benar-benar akurat sesuai dengan kebutuhan peneliti. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan fenomena yang diteliti secara lengkap dan mendalam, juga makna dan konteksnya. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pencatatan dan pelaporan keuangan Kelurahan Pucangsawit sudah menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan menggunakan sistem akuntansi basis akrual.

Kata kunci: Akuntansi Sektor Publik. Basis Akrual. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Abstract

This study aims to analyze the implementation of public sector accounting in Pucangsawit Village, Jebres District, Surakarta City. In conducting this study, the role of the researcher as the main instrument directly involved in the research process with data collection techniques through observation and interviews so that the data collected is truly accurate according to the needs of the researcher. This study uses a qualitative descriptive method that allows researchers to describe the phenomena studied completely and in depth, as well as their meaning and context. Based on the results of the study, it was found that the recording and reporting of Pucangsawit Village finances have used Government Accounting Standards (SAP) and used an accrual basis accounting system.

Keywords: Public Sector Accounting, Accrual Basis, Government Accounting Standards (SAP)

1. PENDAHULUAN

Akuntansi adalah ilmu yang saat ini berkembang dengan pesat, khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan. Akuntansi sektor publik terdapat laporan akuntansi pemerintah (*Governmental Accounting*). Akuntansi pemerintah adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mengkhususkan pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di lingkup pemerintahan. Akuntansi pemerintah tidak hanya diterapkan di sektor pemerintahan pusat, namun juga ditingkat daerah sampai dengan di wilayah desa, yang semuanya membutuhkan suatu pertanggungjawaban disetiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan (Nurcholis, 2021). Terkait pembuatan laporan pertanggungjawaban yang masih belum memahami akuntansi pemerintahan secara benar, khususnya untuk sektor daerah, harus diperhatikan dan diberdayakan. Desa memiliki suatu wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan sistem akuntansi yang baik. Sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dalam rangka mengelola dana desa dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintahan mempunyai peranan penting dalam akuntansi sektor pemerintahan. Sektor pemerintahan khususnya lingkup desa lebih menekankan pada pemeriksaan serta sistem akuntansi, standar sistem akuntansi khususnya lembaga pemerintahan membuat akuntansi ini menjadi akuntansi

yang wajib disesuaikan dengan standar akuntansi setiap lembaga, Kualitas laporan keuangan dapat dilihat apakah telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (Maulida, 2021).

Akuntansi Sektor Publik di Kelurahan Pucangsawit memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan tersebut harus dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Penerapan akuntansi sektor publik di kelurahan didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dan Peraturan kelurahan dalam pelaporan akuntansi berakar pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengharuskan pengelolaan keuangan daerah termasuk di tingkat kelurahan dilakukan secara tertib, efisien, dan transparan.

Atas dasar uraian di atas maka masalah yang ingin penulis teliti adalah bagaimanakah implementasi akuntansi sektor publik dalam pencatatan dan pelaporan keuangan di kelurahan Pucangsawit. Adanya penelitian ini bertujuan untuk memahami pentingnya penerapan akuntansi sektor publik di instansi pemerintah.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam memperoleh informasi pada laporan ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, karena bertujuan untuk memperoleh penjelasan atau gambaran lebih banyak mengenai pengetahuan dan pemahaman terhadap penerapan akuntansi sektor publik di pemerintahan desa. Teknik pengumpulan data yakni dengan pengamatan peneliti sebagai orang luar (*outside observation*) dan wawancara. Wawancara memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi mendalam dari informan melalui dialog langsung. Informasi ini kemudian digunakan untuk menggambarkan fenomena secara detail.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) telah menyusun standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 tahun 2010 menggantikan PP nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa SAP berbasis kas menuju akrual/*cash toward accrual (CTA)* berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan akuntansi basis akrual sampai dengan jangka waktu yang paling lama 4 (empat) tahun setelah tahun anggaran 2010. Hal ini berarti implementasi akuntansi akrual sudah harus diimplementasikan pada tahun 2015. Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memerhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual waktu pencatatan sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.

Kami melakukan penelitian terkait akuntansi sektor publik di Kantor Kelurahan Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dengan narasumber Bapak Aris Setyawan yang menjabat sebagai Sekertaris Lurah. Kelurahan Pucangsawit telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam pencatatan dan pelaporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas berbasis akrual. Selain itu, kelurahan Pucangsawit ini juga menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual, yang diterapkan melalui pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bekerja sama dengan Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Pencatatan transaksi keuangan sudah sepenuhnya digital melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk perencanaan, pembiayaan, penganggaran, serta Sistem Pengendalian atas Anggaran dan Sistem (SPAS) untuk pengelolaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Sumber dana yang dikelola oleh kelurahan antara lain berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Kelurahan Pucangsawit wajib menyusun Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk setiap kegiatan yang dibiayai, dengan rincian anggaran yang disusun sesuai dengan Standar Satuan Harga (SSH). Proses pelaporan dimulai dengan penetapan Uang Persediaan (UP) yang digunakan sepanjang tahun dan dilanjutkan dengan pengajuan anggaran yang disetujui oleh BKPSDM. Setelah kegiatan atau pembangunan dilaksanakan, pengSPJ-an dilakukan. Semua laporan keuangan melibatkan pegawai kelurahan, termasuk bendahara dan petugas yang bertanggung jawab atas kegiatan yang menggunakan anggaran, serta Lurah sebagai pengawas. Kelurahan Pucangsawit juga memiliki batas waktu yang ketat dalam pelaporan keuangan, dengan pengSPJ-an dilakukan segera setelah kegiatan selesai untuk memastikan akurasi laporan. Selain itu, laporan keuangan di kelurahan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kendala utama dalam penyusunan laporan bukan pada proses penyusunan, namun pada masalah teknis saat mengunggah data laporan yang terkadang mengalami gangguan sistem.

Laporan keuangan di Kelurahan Pucangsawit tidak terbuka untuk publik, melainkan hanya dapat diakses oleh pegawai kelurahan karena merupakan dokumen rahasia. Meskipun demikian, kelurahan memastikan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana publik dengan menyusun laporan pertanggungjawaban atas setiap kegiatan, serta melibatkan tim pengawas yang turun langsung ke lapangan untuk memantau penggunaan dana.

Kelurahan Pucangsawit menjalani audit rutin terhadap laporan keuangan, yang dilakukan oleh Inspektorat tingkat kota sebanyak 2-3 kali dalam setahun, serta audit tahunan oleh BPK Pusat. Apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan yang diaudit, kelurahan akan menilai tingkat kesalahan tersebut. Kesalahan yang dapat ditoleransi akan diperbaiki dengan mengganti selisih yang dipakai, sementara kesalahan yang tidak dapat ditoleransi, seperti korupsi, akan ditindaklanjuti dengan sanksi yang sesuai.

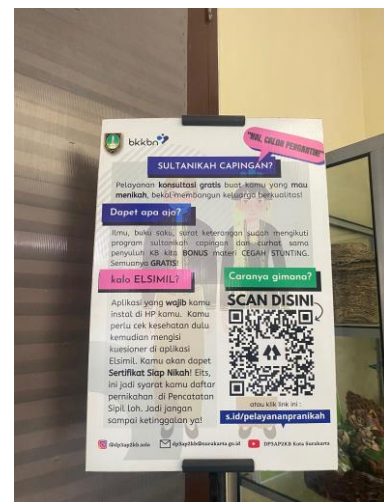
Gambar



Gambar 1. Bagan Pekerja Sosial Masyarakat Kelurahan Pucangsawit



Gambar 2. Ruang Pelayanan Kelurahan Pucangsawit



Gambar 3. Pamflet Konsultasi mengenai Pernikahan



Gambar 4. Pamflet Pelayanan yang ada di Kelurahan Pucangsawit



Gambar 5. Dokumentasi dengan Sekretaris Lurah



Gambar 6. Dokumentasi dengan Sekretaris Lurah

4. KESIMPULAN

Akuntansi sektor publik sangat penting dalam menyajikan pelaporan keuangan dengan menggunakan klasifikasi akun standar, prosedur dan proses pencatatan serta penjurnalan sesuai dengan alur bisnis organisasi sektor publik termasuk penganggaran, perbendaharaan, dan pelaporan akuntansi. Kelurahan Pucangsawit sudah mengikuti dan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual dalam pencatatan dan pelaporannya. Adanya sistem aplikasi yang digunakan sangat membantu dalam merencanakan, mencatat, dan melaporkan laporan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian, akuntansi sektor publik sangat penting untuk diterapkan di Kelurahan Pucangsawit, karena pelaksanaan dari akuntansi sektor publik memiliki banyak dampak positif terutama mengenai kualitas laporan keuangan, menunjukkan bahwa semakin tinggi pelaksanaan akuntansi sektor publik semakin baik kualitas laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, S. (2023). ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGALOKASIAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH DESA (Studi: Desa Kayu Batu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan). In *Jurnal Ilmu Pendidikan* (Vol. 7, Issue 2).
- Kaumbang, J., Pangemanan, S. S., & Wokas, H. R. N. (2016). Analisis Penyusunan Anggaran Pada Kantor Kelurahan Karame Kecamatan Singkil Kota Manado Tahun Anggaran 2014. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 11(3), 115–124. <https://doi.org/10.32400/gc.11.3.13137.2016>
- Nevi Costari & Putri Ariella Belinda. (2021)Nevi Costari, & Putri Ariella Belinda. (2021). Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Suatu Instansi Pemerintahan. *Jamanta: Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 1(1), 58–77. https://doi.org/10.36563/jamanta_unita.v1i1.421
- Satrio, M. D., Yuhertiana, I., & Hamzah, A. (2016). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua diKabupaten Jombang. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 18(1), 59–69. <https://doi.org/10.9744/jak.18.1.59-70>
- (BPK, 2010)BPK. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>